



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jl. Untung Surapati 2 Semarapura; Telepon (0366)21382; Fax (0366)23337



**PEMUTAKHIRAN**  
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**STRATEGIS (KLHS)**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEMESTA**  
**BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**TAHUN 2018-2023**

**PENJAMINAN KUALITAS**

**OLEH**  
**BUPATI KLUNGKUNG**

**SEMARAPURA**  
**2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur diucapkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Waça, karena atas karunia-Nya penyusunan Penjaminan Kualitas Pemutakhiran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan. Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 – 2023 ini disusun sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Demikian buku ini disusun, selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023 untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Semarang, 8 Maret 2022  
Ketua Tim Pembuat KLHS RPJMD  
Kabupaten Klungkung,

Ir. I GEDE PUTU WINASTRA, MMA

NIP. 196307211988031013



## PENJAMINAN KUALITAS

### PEMUTAKHIRAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023

Penanggung Jawab	Bupati Klungkung
Tim Penyusun	Sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 56/24/HK/2022, tanggal 18 Januari 2022
Tahun	2022

#### FORM 1

#### PENJAMINAN KUALITAS HASIL KLHS RPJMD DALAM DOKUMEN RPJMD

Substansi	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
KLHS RPJMD	Seperti apa kondisi daya dukung dan daya tampung di daerah anda? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? dan seperti apa isu dan permasalahannya?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Daya tampung penduduk wilayah Kabupaten Klungkung berdasarkan luas lahan efektif yang dapat dimanfaatkan yaitu sebanyak 87.812 orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2020 “telah melampaui daya dukungnya”. Untuk standar daerah telah terlampaui sebanyak 119.113 orang atau 135,65% dari daya tampungnya. Daya tampung penduduk di seluruh kecamatan telah terlampaui dimana untuk standar daerah, Kecamatan Nusa Penida terlampaui 9,67%, Banjarangkan sebanyak 185,75%, Klungkung sebanyak 769,36%, dan Dawan sebanyak 225,52%</li><li>2. Dari aspek kemampuan lahan, lahan Kabupaten Klungkung didominasi oleh kemampuan lahan Kelas VI, Kelas III dan Kelas IV. Lahan Kelas VI mempunyai faktor pembatas lereng agak curam 30-45 %, erosi berat, kedalaman tanah &lt; 30 cm. Lahan Kelas III mempunyai faktor pembatas lereng 8-15%, kedalaman tanah 50-90 cm, tekstur agak kasar. Lahan Kelas IV mempunyai faktor pembatas lereng 15-30 %.</li><li>3. Ketersediaan lahan di Kabupaten Klungkung yang sesuai untuk kawasan permukiman adalah seluas 19,445.94 Ha dengan sebaran 14,887.73 Ha di Kecamatan Nusa Penida, 1,539.93 Ha di Kecamatan Banjarangkan, 1,419.05 Ha di Kecamatan Klungkung, dan 1,599.24 Ha di Kecamatan Dawan. Sedangkan kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2020 adalah 1.195,4 ha, dengan sebaran 331,7 Ha di Kecamatan Nusa Penida, 256,9 Ha di Kecamatan Banjarangkan, 371,4 Ha di Kecamatan Klungkung, dan 236,4 Ha di Kecamatan Dawan. Kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2033 meningkat menjadi 1.571,4 Ha. Dengan demikian, status daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 adalah surplus yang artinya ketersediaan lahan untuk permukiman lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan lahan untuk permukiman.</li><li>4. Ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Klungkung adalah 35.458,21 ha dengan sebaran 11.509,22 Ha di Kecamatan Nusa Penida, 9.175,55 Ha di Kecamatan Banjarangkan, 5.421,13 Ha di Kecamatan Klungkung, dan 9.352,31 Ha di Kecamatan Dawan. Kebutuhan lahan</li></ol>



Substansi 1	Pertanyaan 2	Jawaban 3
		<p>pertanian dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak pada tahun 2020 adalah 51.848 ha. Dengan demikian, status daya dukung lahan pertanian pada tahun 2020 adalah defisit dengan nilai indeks 0,68. Defisit daya dukung lahan di semua kecamatan dengan nilai indeks berkisar 0,34 – 0,91 dimana defisit terbesar di Kecamatan Klungkung dan terendah di Kecamatan Dawan.</p> <p>5. Status daya dukung air permukaan di Kabupaten Klungkung adalah defisit sebesar 110,47 juta m<sup>3</sup>/tahun. Jika ditambah dengan air tanah dari CAT, status daya dukung air masih dalam status defisit sebanyak 74,67 juta m<sup>3</sup>/tahun.</p> <p>6. Berdasarkan data koefisien limpasan, curah hujan tahunan dan luas wilayah diperoleh ketersediaan air permukaan di Kabupaten Klungkung sebesar 191,73 juta m<sup>3</sup>/tahun. Ketersediaan air permukaan di Nusa Penida 102,83 juta m<sup>3</sup>/tahun, Banjarangkan 40,14 juta m<sup>3</sup>/tahun, Dawan 21,43 juta m<sup>3</sup>/tahun, dan Klungkung 20,84 juta m<sup>3</sup>/tahun. Berdasarkan debit CAT per hektar diperoleh bahwa potensi ketersediaan air tanah sebanyak 114,53 juta m<sup>3</sup>/tahun dengan sebaran ketersediaan air menurut kecamatan berkisar 7,52 juta – 78,74 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dengan demikian ketersediaan air permukaan dan air tanah dari CAT secara keseluruhan sebanyak 299,78 juta m<sup>3</sup>/tahun. Kebutuhan air di Kabupaten Klungkung tahun 2020 sebanyak 331,08 juta m<sup>3</sup>/tahun, meningkat menjadi 367,55 juta m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2025 dan 408,21 juta m<sup>3</sup>/tahun pada tahun 2030. Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air, status daya dukung air permukaan di Kabupaten Klungkung tahun 2020 adalah defisit dengan indeks 0,58 atau defisit sebanyak 139,35 juta m<sup>3</sup>/tahun. Defisit terutama tiga kecamatan di Klungkung daratan, sementara di Kecamatan Nusa Penida masih surplus sebanyak 11,04 juta m<sup>3</sup>/tahun atau dengan indeks 1,12. Akan tetapi, daya dukung air permukaan di Nusa Penida pada tahun 2025 menjadi defisit sebanyak 1,99 juta m<sup>3</sup>/tahun (indeks 0,98) dan tahun 2030 defisit meningkat menjadi 16,87 juta m<sup>3</sup>/tahun (indeks 0,86). Sementara daya dukung air permukaan secara umum di Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 semakin defisit dengan indeks 0,52 dan tahun 2030 menurun dengan indeks 0,48.</p> <p>7. Daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyediaan menunjukkan daya dukung jasa penyediaan pangan, penyediaan air dan penyediaan energi didominasi kategori sangat rendah, sedangkan jasa penyediaan sumber daya genetik didominasi kategori rendah.</p> <p>8. Daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem budaya menunjukkan daya dukung jasa tempat tinggal dan ruang hidup dan jasa rekreasi dan ekoturisme didominasi kategori rendah, sedangkan jasa estetika alam didominasi kategori sangat rendah.</p> <p>9. Daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pendukung menunjukkan daya dukung jasa pendukung siklus hara dan pendukung biodiversitas didominasi kategori sangat rendah.</p> <p>10. Daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan menunjukkan daya tampung jasa pengaturan iklim, pengaturan tata air dan pencegahan banjir, perlindungan dari bencana alam, pemurnian air, dan</p>



Substansi	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
		<p>pemeliharaan kualitas udara didominasi kategori rendah, sedangkan daya tampung jasa pengaturan tata aliran air dan pencegahan banjir dan pengaturan penguraian limbah didominasi kategori sangat rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Permasalahan terkait daya dukung lahan dan air adalah sebagian besar wilayah Kabupaten Klungkung merupakan wilayah perbukitan dan kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau kecil dengan topografi dominan berbukit dan berkarakter geologi batuan karst.</li> <li>12. Permasalahan terkait dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem yang didominasi oleh kategori rendah dan sangat rendah yaitu kondisi liputan lahan atau proporsi tutupan lahan vegetasi dan hutan yang masih berada di bawah standar ideal serta wilayah pulau-pulau kecil didominasi oleh lahan kritis.</li> <li>13. Isu strategis terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu rendahnya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan.</li> </ol>
	Seperti apa kondisi kerawanan bencana (banjir, kekeringan, land subsident/longsor, dan rob) di daerah anda?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidro-meteorologis, wilayah Kabupaten Klungkung berpotensi mengalami bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut.</li> <li>2. Kabupaten Klungkung memiliki daerah rawan bencana banjir genangan tersebar di daerah hilir pengaliran sungai-sungai besar yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh.</li> <li>3. Kerawanan bencana tanah longsor termasuk rawan sedang sampai rawan. Daerah rawan bencana tanah longsor terdapat di daerah perbukitan terutama Kecamatan Dawan.</li> <li>4. Wilayah Kabupaten Klungkung termasuk rawan bencana letusan Gunung Agung berupa daerah rawan terlanda aliran lahar/banjir di daerah pengaliran Tukad Telaga Waja dan Tukad Unda.</li> <li>5. Kabupaten Klungkung termasuk daerah rawan bencana gempa bumi Zona I (daerah sangat rawan).</li> <li>6. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Klungkung termasuk daerah rawan bencana tsunami yaitu zona kerawanan tinggi dan menengah tersebar di seluruh kawasan pantai Klungkung daratan, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.</li> <li>7. Kabupaten Klungkung termasuk daerah dengan kerawanan tinggi dari bencana angin kencang/cuaca ekstrem karena posisinya berdekatan dengan lintasan jejak badai tropis di Samudera Hindia dan daerah dataran rendah yang tidak memiliki sistem penghalang (<i>barrier</i>) alamiah dari tiupan angin kencang.</li> </ol>
KLHS RPJMD	Daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari aspek sumber daya alam, Kabupaten Klungkung hanya memiliki keunggulan daya saing sumber daya lahan hutan rakyat dan sumber daya air.</li> <li>2. Dari aspek infrastruktur, Klungkung memiliki keunggulan daya saing aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan.</li> <li>3. Dari aspek ketenagakerjaan, Kabupaten Klungkung memiliki keunggulan daya saing Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan penduduk Kabupaten Klungkung</li> </ol>



Substansi	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
		<p>lebih aktif secara ekonomi dibandingkan kabupaten/kota lainnya Bali, serta tingkat pengangguran terbuka yang sangat rendah. Namun demikian Klungkung mempunyai kelemahan dalam hal angka ketergantungan umur yang relatif tinggi.</p> <p>4. Ditinjau dari aspek Pendidikan, Kabupaten Klungkung memiliki kelemahan hampir semua sub-variabel seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan.</p>

**FORM 2**  
**PENJAMINAN KUALITAS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
**DALAM DOKUMEN RPJMD**

Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
<b>TPB 1</b>	<b>Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>	Berapa persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penduduk miskin 2020: 4,87%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya pengentasan kemiskinan belum secara terpadu</li> <li>- Kesenjangan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Klungkung kepulauan.</li> <li>- Terpuruknya perekonomian daerah sebagai dampak pandemi COVID-19 tahun 2020.</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 1</b>		Berapa persentase penduduk yang menjadi peserta Jamkesmas dan/atau Jamkesda? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 2020: 100%</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 1</b>		Berapa persentase pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 2017: 15,48%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah</li> <li>- Pengawasan dan pembinaan masih sangat terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 1</b>		Berapa persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Belum tersedia data
<b>TPB 2</b>	<b>Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>	Berapa proporsi penduduk yang memiliki asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi penduduk yang memiliki asupan kalori di bawah 2.100 Kkal/kapita/hari : 0%</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 2</b>		Berapa tingkat prevalensi balita gizi kurang? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi balita gizi kurang: 4,7%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan orang tua terutama ibu mengenai gizi belum merata</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			- Perubahan pola asupan makanan pada balita yang kurang memperhatikan kecukupan gizi
<b>TPB 2</b>		Berapa tingkat prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat: 0%</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 2</b>		Berapa skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor PPH 2020: 88,0%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat keanekaragaman pangan masih rendah</li> <li>- Perubahan pola konsumsi mengarah pada kegemaran terhadap makanan instan cenderung meningkat</li> <li>- Rendahnya kesadaran terhadap pola konsumsi pangan berkualitas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 2</b>		Berapa Nilai Tambah Pertanian per tenaga kerja? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tambah Pertanian per tenaga kerja 2020: Rp. 43,36 juta per tenaga kerja</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur irigasi pengairan masih terbatas.</li> <li>- Lahan kritis terutama di Nusa Penida</li> <li>- Penggunaan varietas unggul masih terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 2</b>		Berapa proporsi ketersediaan daging untuk pemenuhan kebutuhan pangan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Belum tersedia data
<b>TPB 3</b>	<b>Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>	Berapa rata-rata angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AKI 2020: 72,90 per 100.000 KH</li> <li>• Permasalahan : kesadaran ibu menjaga kesehatan selama kehamilan belum merata</li> </ul>
<b>TPB 3</b>		Berapa rata-rata persalinan yang mendapat pertolongan pada fasilitas kesehatan dan/atau oleh tenaga kesehatan terlatih? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase persalinan yang mendapat pertolongan pada fasilitas kesehatan dan/atau oleh tenaga kesehatan terlatih 2020: 106,2%</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 3</b>		Berapa target penurunan Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AKABa 2020: 8,51 per 1000 KH</li> <li>• Target penurunan AKABa: 6,8 per 1000 KH tahun 2023</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 3</b>		Berapa rata-rata angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kematian Neonatal 2020: 2,60 per 1000 KH</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 3</b>		Berapa rata-rata angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AKB 2020: 5,50 per 1000 KH</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 3</b>		Berapa jumlah desa yang termasuk Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa yang termasuk Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) : 59</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 3</b>			



Substansi 1	Tujuan 2	Pertanyaan 3	Jawaban 4
TPB 3		Berapa tingkat prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi HIV/AIDS 2020: 0,02 per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keasadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya HIV masih belum merata</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insidens Tuberkulosis 2020: 63,92 per 100.000 penduduk</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku hidup bersih dan sehat belum merata</li> <li>- Kedisiplinan penderita dalam proram pengobatan belum optimal</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa rata-rata angka kejadian Malaria per 1000 orang? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejadian malaia 2020: 0,0 per 1000 penduduk</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa angka prevalensi tekanan darah tinggi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi tekanan darah tinggi 2017: 20%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan pola makan</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa angka prevalensi pemakaian kontrasepsi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi pemakaian kontrasepsi 2020: 84,00%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran masyarakat berKB belum merata</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa rata-rata angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun: 84,00%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran masyarakat berKB belum merata</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2017: 42,67%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran masyarakat berKB belum merata</li> </ul> </li> </ul>
TPB 3		Berapa rata-rata angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 2017: 10 per 1000 perempuan</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
TPB 3		Berapa angka Total Fertility Rate (TFR) ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Fertility Rate (TFR) 2017: 2,1</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
TPB 4		Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Berapa rata-rata angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?
TPB 4	Berapa rata-rata angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• APK SMP 2020: 98,21%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan belum merata</li> </ul> </li> </ul>
TPB 4			



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			- Kondisi geografis dan jarak rata-rata sekolah relatif jauh menghambat minat melanjutkan pendidikan
<b>TPB 4</b>		Berapa rata-rata angka lama sekolah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata lama sekolah 2020: 8,13 tahun</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan bahkan tidak pernah sekolah</li> <li>- Rendahnya minat dan kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun untuk mengikuti paket A, B dan C</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 4</b>		Berapa rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APK PAUD : Data belum tersedia</li> <li>• Permasalahan : Ketersediaan fasilitas PAUD belum merata sampai ke pelosok desa</li> </ul>
<b>TPB 4</b>		Berapa rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APK SMA/SMK 2020: 93,32%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan belum merata</li> <li>- Kondisi geografis dan jarak rata-rata sekolah relatif jauh menghambat minat melanjutkan pendidikan</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 4</b>		Berapa proporsi tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Belum tersedia data
<b>TPB 4</b>		Berapa rata-rata penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata penduduk yang berusia &gt;15 Tahun melek huruf 2020: 91,56%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang tidak pernah sekolah</li> <li>- Rendahnya minat dan kesempatan penduduk usia di atas 25 tahun mengikuti pembelajaran membaca dan menulis</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 5</b>	<b>Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>	Berapa jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 2020: 1 (satu)</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 5</b>		Berapa tingkat Rasio KDRT? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan 2017: 0,01%</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 5</b>		Bagaimana cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 2020: 100%</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 5</b>			
<b>TPB 5</b>		Berapa besar proporsi perempuan di DPRD? Jelaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi perempuan di DPRD: 16,67%</li> </ul>



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
		permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan : minat dan kesempatan perempuan berpartisipasi di bidang politik lebh rendah dibandingkan laki-laki</li> </ul>
<b>TPB 5</b>		Berapa proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eseleon I dan II) : 6,25%</li> <li>Permasalahan : jumlah perempuan yang memenuhi persyaratan menduduki jabatan Eselon I dan II sangat sedikit</li> </ul>
<b>TPB 5</b>		Berapa jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unmet need ber-KB 2020: 4,5%</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan masyarakat tentang layanan KB belum merata</li> <li>Belum meratanya masyarakat memperoleh akses pelayanan KB</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>	<b>Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>	Berapa besar proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak: 100%</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa jumlah sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang telah dilaksanakan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang telah dilaksanakan 2020: 47 desa/kelurahan</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran sebagian masyarakat terhadap sanitasi masih rendah</li> <li>- Akses layanan sanitasi belum merata di seluruh wilayah</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 2020: 47 desa/kelurahan</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran sebagian masyarakat terhadap sanitasi masih rendah</li> <li>- Akses layanan sanitasi belum merata di seluruh wilayah</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa rata-rata Indeks Kualitas Air pada berbagai sumber air? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>IKA berdasarkan Skor Storet : Tukad Unda = -28 (cemar sedang), Tukad Jinah = -20 (cemar sedang), Tukad Bubuh = -20 (cemar sedang)</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban pencemaran bahan-bahan organik ke sungai relatif tinggi khususnya di daerah hilir sungai</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa jumlah izin penggunaan air tanah yang diterbitkan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah izin penggunaan air tanah yang diterbitkan: data belum tersedia</li> <li>Permasalahan : Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengambilan air tanah untuk kegiatan komersil</li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): 47 DAS</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> </ul>



Substansi 1	Tujuan 2	Pertanyaan 3	Jawaban 4
		Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	
<b>TPB 6</b>		Berapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya: data belum tersedia</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya data dan informasi tentang mata air</li> <li>- Belum terlaksananya perlindungan mata air secara terpadu dan berbasis masyarakat</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa jumlah izin perhutanan sosial yang diterbitkan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah izin perhutanan sosial yang diterbitkan: tidak ada (nihil)</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pengelolaan kawasan hutan dengan pemerintah provinsi belum berjalan optimal</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 6</b>		Berapa jumlah Forum DAS yang telah terbentuk? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah Forum DAS yang telah terbentuk: 1 buah di tingkat provinsi</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pengelolaan DAS masih belum optimal</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 7</b>	<b>Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</b>	Berapa besar presentase rumah tangga pengguna listrik? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio elektrifikasi: 100%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat gangguan listrik di Nusa Penida masih tinggi</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 8</b>		Berapa besar persentase UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan (Perbankan maupun non-perbankan) ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase akses UMKM ke layanan keuangan 2017: 54,73%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skim-skim pembiayaan UMKM yang terjangkau masih terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 8</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>	Berapa rata-rata tingkat pengangguran terbuka? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pengangguran terbuka 2020: 5,42%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peralihan struktur ekonomi dari dominasi sektor primer (pertanian) ke sektor jasa</li> <li>- Ketidaksesuaian lapangan kerja yang tersedia dengan keinginan pencari kerja</li> <li>- Ketidaksesuaian lapangan kerja tersedia dengan tingkat Pendidikan/ keterampilan tenaga kerja</li> <li>- Sistem informasi ketenagakerjaan belum terbangun</li> <li>- Tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak pandemi.</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 8</b>		Persentase tingkat setengah pengangguran? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat setengah pengangguran 2019: 24,76%</li> <li>• Permasalahan :</li> </ul>



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peralihan struktur ekonomi dari dominasi sektor primer (pertanian) ke sektor jasa</li> <li>- Ketidaksihesuaian lapangan kerja yang tersedia dengan keinginan pencari kerja</li> <li>- Ketidaksihesuaian lapangan kerja tersedia dengan tingkat Pendidikan/ keterampilan tenaga kerja</li> <li>- Sistem informasi ketenagakerjaan belum terbangun</li> </ul>
<b>TPB 8</b>		Berapa persentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan perlindungan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan perlindungan: data belum tersedia</li> <li>• Permasalahan : Sistem informasi ketenagakerjaan belum terbangun</li> </ul>
<b>TPB 8</b>		Berapa persen kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2020: 10,33%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi sektor pariwisata masih rendah</li> <li>- Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dalam satu sampai dua tahun ke depan sehingga pembatasan perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara masih diterapkan.</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 8</b>		Berapa jumlah total Kunjungan wisata tahun terakhir? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah total Kunjungan wisata 2020: Wisman 120.023 orang dan Wisnus 6.370 orang</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksesibilitas pariwisata masih terbatas</li> <li>- Promosi pariwisata belum optimal</li> <li>- Daya tarik wisata belum tertata dan dikelola secara optimal</li> <li>- Pandemi covid-19</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 8</b>		Berapa persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2020: 10,33%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investasi sektor pariwisata masih rendah</li> <li>- Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dalam satu sampai dua tahun ke depan sehingga pembatasan perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara masih diterapkan.</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 9</b>	<b>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>	Berapa jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang ada di daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelabuhan laut : 9 buah, bandara : 0, Terminal Bis : 1 buah</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar pelabuhan laut belum dilengkapi fasilitas pokok pelabuhan</li> <li>- Jumlah pelabuhan penyeberangan masih kurang memadai terhadap tingginya pergerakan barang dan penumpang</li> <li>- Terhambatnya penyelesaian dermaga penyeberangan Gunaksa</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			- Nusa Lembongan/Nusa Ceningan belum memiliki dermaga penyeberangan
<b>TPB 9</b>		Berapa besar kontribusi sektor industri terhadap PDRB? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2020: 9,57%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penumbuhan industri baru masih rendah</li> <li>- Produktivitas industri pengolahan masih rendah</li> <li>- Sentra-sentra IKM belum terbina secara optimal</li> <li>- Pembangunan industri belum secara optimal melalui pendekatan terpadu antar sektor terutama dengan sektor pertanian dan pariwisata</li> <li>- Pemerataan usaha industri masih rendah karena keterbatasan infrastruktur khususnya di wilayah kepulauan</li> <li>- Tingkat penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna dan ICT untuk mendukung pembangunan industri kecil dan menengah masih terbatas</li> <li>- Akses permodalan usaha bagi IKM masih terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 9</b>		Berapa besar persentase Perubahan Emisi CO <sub>2</sub> /Emisi Gas Rumah Kaca? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Data belum tersedia
<b>TPB 9</b>		Berapa besar proporsi rumah tangga yang dapat mengakses internet? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi rumah tangga yang dapat mengakses internet 2020: 57,37%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas pelayanan jaringan internet di ruang publik masih terbatas</li> <li>- Fasilitas jaringan internet belum menjangkau seluruh desa</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 9</b>		Berapa besar presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon: 72,23%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebaran manara dan BTS tidak merata atau belum menjangkau seluruh desa</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 9</b>		Berapa jumlah daerah tertinggal yang terselesaikan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Tidak ada daerah kategori tertinggal
<b>TPB 10</b>		Berapa jumlah desa tertinggal di daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Tidak ada desa kategori tertinggal
<b>TPB 10</b>	<b>Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara</b>	Berapa jumlah Desa Mandiri di daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah Desa Mandiri: 35 desa dari 59 desa/kelurahan</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia dan profesional di desa</li> <li>- Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			<p>desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya peran kelembagaan ekonomi di pedesaan</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi di pedesaan</li> <li>- Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.</li> <li>- Kurangnya jejaring, informasi dan teknologi pada masyarakat pedesaan.</li> <li>- Menurunnya “budaya” gotong royong di pedesaan</li> </ul>
<b>TPB 10</b>		Berapa angka rata-rata pertumbuhan ekonomi pada daerah dengan kategori daerah tertinggal? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Tidak ada daerah kategori tertinggal
<b>TPB 10</b>		Berapa jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Data belum tersedia
<b>TPB 10</b>		Berapa angka rasio rumah layak huni? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka rasio rumah layak huni 2020: 98,25%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memperoleh bantuan bedah rumah</li> <li>- Masih terdapat daerah kumuh perkotaan</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 11</b>	<b>Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>	Berapa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum transportasi darat 2020: 25,00%</li> <li>• jumlah orang yang terangkut angkutan umum transportasi laut 2020: 649.501 orang berangkat dan 544.322 orang datang.</li> <li>• jumlah barang yang terangkut angkutan umum transportasi laut 2020: 63,61 ton muat dan 67,82 ton bongkar.</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Pelabuhan Padangbai sebagai sandingan penyeberangan Pelabuhan Mentigi/Nusa Penida sangat terbatas</li> <li>- Terhambatnya penyelesaian dermaga penyeberangan Gunaksa</li> <li>- Nusa Lembongan/Nusa Ceningan belum memiliki dermaga penyeberangan</li> <li>- Pelabuhan angkutan laut belum dilengkapi dermaga sebagai fasilitas pokok pelabuhan baik di Klungkung daratan maupun Klungkung kepulauan</li> </ul> </li> </ul>



Substansi 1	Tujuan 2	Pertanyaan 3	Jawaban 4
<b>TPB 11</b>		Berapa jumlah fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia: 5 unit</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas pengelolaan sampah perkotaan (penampungan, pengangkutan dan pengolahan) dan personil masih terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 11</b>		Berapa jumlah kota yang telah menerapkan green waste? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah kota yang telah menerapkan green waste: NIHIL</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur air limbah perkotaan belum terbangun</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 11</b>		Berapa angka Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB ? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Data belum tersedia
<b>TPB 11</b>		Berapa rasio limbah B3 yang dikelola? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>rasio limbah B3 yang dikelola: data belum tersedia</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3</li> <li>Lemahnya monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap usaha/ kegiatan yang memperoleh izin lingkungan</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 11</b>		Berapa presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah sampah yang berkurang melalui 3R : 30,52 ton/hari</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas/kemampuan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah masih rendah</li> <li>Terbatasnya dukungan fasilitas daur ulang sampah di tingkat masyarakat</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 11</b>		Berapa jumlah perusahaan yang telah menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah perusahaan yang telah menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001: NIHIL</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pembinaan penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 kepada perusahaan</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 12</b>		<b>Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>	Berapa jumlah laporan inventarisasi GRK? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?
<b>TPB 12</b>	Berapa jumlah kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional yang terlaksana di daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?		<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional yang terlaksana di daerah: 1 kebijakan (RZWP-3-K)</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 12</b>	Berapa jumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan? Jelaskan permasalahan terkait indikator		<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan : 1 buah (WPPNRI 573)</li> <li>Permasalahan :</li> </ul>



Substansi	Tujuan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
		tersebut? (Untuk 11 wilayah prioritas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan sumber daya ikan masih belum optimal</li> <li>- Perlindungan dan pemberdayaan nelayan masih belum optimal</li> </ul>
<b>TPB 13</b>	<b>Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>	Berapa proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah produksi perikanan tangkap 2020: 2.384 ton</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kemampuan adaptasi nelayan terhadap perubahan pola migrasi ikan dan ketidakpastian cuaca sebagai dampak dari perubahan iklim</li> <li>- Pemberdayaan nelayan masih belum optimal</li> <li>- Sarana dan prasarana perikanan tangkap masih terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 14</b>	<b>Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>	Berapa total luas kawasan konservasi perairan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• total luas kawasan konservasi perairan: 20.057,2 ha.</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan KKP belum efektif karena lambatnya pengalihan kewenangan pengelolaan KKP Nusa Penida sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 14</b>		Berapa persentase kepatuhan pelaku usaha? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Nihil pelanggaran pelaku usaha
<b>TPB 14</b>		Berapa jumlah kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang tersedia terkait dengan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang tersedia terkait dengan perlindungan hak akses untuk perikanan skala kecil: NIHIL.</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya perlindungan nelayan kecil</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 14</b>		Berapa jumlah bina kelompok nelayan yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah bina kelompok nelayan yang tersedia: 79 kelompok.</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya perlindungan dan pemberdayaan nelayan</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 14</b>		Berapa rasio nelayan yang terlindungi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rasio nelayan yang terlindungi: NIHIL.</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya perlindungan dan pemberdayaan nelayan</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 15</b>	<b>Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan</b>	Berapa rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	Data belum tersedia
<b>TPB 15</b>		Berapa jumlah UPTD KPH yang terbentuk di daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah UPTD KPH yang terbentuk di daerah: 1 KPH</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya koordinasi pengelolaan kawasan hutan di daerah</li> <li>- Tingginya lahan kritis di dalam kawasan hutan</li> </ul> </li> </ul>



Substansi 1	Tujuan 2	Pertanyaan 3	Jawaban 4
<b>TPB 15</b>		Berapa total luas lahan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>total luas lahan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi: 0 ha</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan lahan kritis belum dilakukan secara terencana dan terpadu</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 15</b>		Berapa jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah yang tersedia: NIHIL</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya tingkat kemerosotan sumber daya plasma nutfah lokal</li> </ul> </li> </ul>
<b>TPB 16</b>	<b>Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>	Berapa besar Rasio KDRT? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio KDRT: NIHIL</li> <li>Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 16</b>		Berapa jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak mendapatkan penanganan: 100%</li> <li>Permasalahan : -</li> </ul>
<b>TPB 16</b>		Berapa tingkat rasio bayi berakte kelahiran? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase anak yang memiliki akta kelahiran: 95.2%</li> <li>Permasalahan : Kesadaran masyarakat mengurus akte kelahiran anak masih rendah</li> </ul>
<b>TPB 16</b>		Berapa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah akta kelahiran yang diterbitkan: 123.323</li> <li>Permasalahan : Kesadaran masyarakat mengurus akte kelahiran anak masih rendah</li> </ul>
<b>TPB 17</b>	<b>Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global dalam Pembangunan Berkelanjutan</b>	Berapa jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): NIHIL</li> <li>Permasalahan : -</li> </ul>



**Tabel 3. Penjaminan Kualitas SPM dalam Dokumen RPJMD**

Substansi	Urusan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
SPM	Sosial	Berapa persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang haknya dapat dipenuhi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang haknya dapat dipenuhi: 100%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data penyandang disabilitas kelompok miskin dan rentan masih belum valid</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa proporsi korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proporsi korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana: 3,33 per 100.000 penduduk</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya ancaman atau bahaya bencana alam (gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, cuaca ekstrim, dll)</li> <li>- Tingginya kerentanan sosial dan demografis terhadap ancaman bencana alam</li> <li>- Rendahnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa total jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• total jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah: NIHIL</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten dalam upaya peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa jumlah korban bencana sosial yang kebutuhan dasarnya terpenuhi? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah korban bencana sosial yang kebutuhan dasarnya terpenuhi: tidak terdapat korban bencana sosial dalam periode 2013-2020</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
SPM	Sosial	Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan psikososial korban bencana sosial? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan psikososial korban bencana sosial: tidak terdapat korban bencana sosial dalam periode 2013-2020</li> <li>• Permasalahan : -</li> </ul>
SPM	Pendidikan	Apakah daerah anda merupakan daerah rawan bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut? (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• daerah rawan bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus : .67,04%</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum berkembangnya secara optimal program sekolah aman bencana dalam rangka pendidikan pengurangan risiko bencana</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana Kabupaten Klungkung 2020: 133.42</li> <li>• Permasalahan : - <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Urusan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			- Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih rendah
<b>SPM</b>	<b>Trantiblinmas</b>	Berapa besar jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana: Rp. 715.253.980</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya ancaman atau bahaya bencana alam (gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, cuaca ekstrim, dll)</li> <li>Tingginya kerentanan sosial dan ekonomi terhadap ancaman bencana alam</li> <li>Rendahnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Trantiblinmas</b>	Berapa jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah: NIHIL</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas daerah dalam penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana masih terbatas</li> <li>Fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana masih belum optimal</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Kesehatan</b>	Berapa besar tingkat prevalensi anemia pada ibu hamil? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>prevalensi anemia pada ibu hamil: 7,40%</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran ibu hamil tentang asupan gizi belum merata</li> <li>Bantuan Tablet Tambahan Darah bagi ibu hamil belum merata</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Kesehatan</b>	Berapa rata-rata persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 2020: 71,10%</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran ibu tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif belum merata</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Kesehatan</b>	Apakah daerah anda memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Puskesmas telah menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah tenaga medis dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa masih sangat terbatas</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Kesehatan</b>	Berapa tingkat unmet need pelayanan kesehatan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>unmet need pelayanan kesehatan 2020: 1,10%</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat sebagian yang mengalami keluhan kesehatan tidak mampu berobat karena faktor biaya, transportasi/jarak pelayanan kesehatan dan pendamping</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Kesehatan</b>	Berapa tingkat persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>tingkat persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas: 95 %</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyedia dalam melakukan pengiriman barang</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Urusan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			- Terdapat barang yang tidak bisa dipenuhi oleh penyedia
<b>SPM</b>	<b>Kesehatan</b>	Berapa besar kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan: 521 tenaga</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan dalam kepadatan dan distribusi adalah belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di UPTD. Puskesmas se- kabupaten Klungkung</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Pendidikan</b>	Berapa proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum membaca 2020: 96,12%</li> <li>Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum matematika 2020: 92,64%</li> <li>Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum membaca 2020: 97,45%</li> <li>Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum matematika 2020: 92,30%</li> <li>Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum membaca 2020: 71,96%</li> <li>Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum matematika 2020: 51,46%</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen kurikulum dan pembelajaran belum optimal</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPM</b>	<b>Pendidikan</b>	Berapa tingkat proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporsi sekolah dengan akses listrik : 100%</li> <li>Proporsi SD dengan akses internet untuk pengajaran : 47,25%</li> <li>Proporsi SMP dengan akses internet untuk pengajaran :89,47%</li> <li>Proporsi dan SMA dengan akses internet untuk pengajaran : 47,37%</li> <li>Proporsi SD dengan akses komputer untuk pengajaran : 45,00%</li> <li>Proporsi SMP dengan akses komputer untuk pengajaran : 84,21%</li> <li>Proporsi SMA dengan akses komputer untuk pengajaran : 78,95%</li> <li>Proporsi SD dengan Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas : 0%</li> <li>Proporsi SMP dengan Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas : 21,05 %</li> <li>Proporsi SMA dengan Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas : 26,32%</li> <li>Proporsi SD dengan akses air minum layak : 89,50%</li> <li>Proporsi SMP dengan akses air minum layak : 78,95%</li> </ul>



Substansi	Urusan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi SMA dengan akses air minum layak : 89,47%</li> <li>• Proporsi SD dengan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin : 95,50%</li> <li>• Proporsi SMP dengan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin : 89,47%</li> <li>• Proporsi SMA dengan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin : 57,89%</li> <li>• Proporsi SD dengan fasilitas cuci tangan : 94,00%</li> <li>• Proporsi SMP dengan fasilitas cuci tangan : 73,68%</li> <li>• Proporsi SMA dengan fasilitas cuci tangan : 78,95%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung penyediaan fasilitas penunjang pendidikan masih rendah</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Pendidikan	Berapa besar angka persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik : 18,64%</li> <li>• Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik : 70,49%</li> <li>• Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik : 58,98%</li> <li>• Persentase guru SMA/ SMK yang bersertifikat pendidik : 40,84%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan guru sebagian belum memenuhi persyaratan sertifikasi pendidik</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Pekerjaan Umum	Berapa besar kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau : 274,30 m<sup>3</sup>/dtk</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber air baku di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sangat terbatas</li> <li>- Sumber air baku yang tersedia di Nusa Penida sulit diakses</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Pekerjaan Umum	Berapa besar angka persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 2020: 98,25%</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran sebagian masyarakat terhadap sanitasi masih rendah</li> <li>- Akses masyarakat terutama golongan miskin terhadap layanan sanitasi layak masih terbatas</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Pekerjaan Umum	Apakah daerah anda telah membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Kabupaten Klungkung belum ada terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal</li> <li>• Permasalahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan lahan untuk membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota dan komunal di Klungkung daratan sangat terbatas</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Urusan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Nusa Penida dan sekitarnya</li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa rata-rata jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana : 3,38 per 100.000 orang penduduk</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya tingkat ancaman bencana (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, cuaca ekstrim/angin kencang, banjir)</li> <li>- Tingginya tingkat kerentanan sosial karena daerah rawan bencana merupakan pusat-pusat permukiman</li> <li>- Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih rendah</li> <li>- Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa tingkat Indeks Risiko Bencana Daerah? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana Daerah: 133.42</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah</li> <li>- Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih rendah</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang tersedia : 1 (satu)</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas daerah untuk membangun sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan sangat terbatas</li> <li>- Belum adanya fasilitasi Pemerintah/Pemerintah Provinsi dalam upaya pengembangan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan di daerah</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Apakah daerah anda memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Klungkung belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas daerah untuk menyediakan dokumen strategi pengurangan risiko bencana sangat terbatas</li> <li>- Belum adanya fasilitasi Pemerintah/Pemerintah Provinsi untuk penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana</li> </ul> </li> </ul>
SPM	Trantiblinmas	Berapa jumlah strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah yang tersedia? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Klungkung belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana</li> <li>• Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas daerah untuk menyediakan dokumen strategi pengurangan risiko bencana sangat terbatas</li> </ul> </li> </ul>



Substansi	Urusan	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3	4
			- Belum adanya fasilitasi Pemerintah/Pemerintah Provinsi untuk penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana
<b>SPM</b>		Berapa jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister? Jelaskan permasalahan terkait indikator tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Klungkung belum memiliki fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister</li> <li>Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas daerah untuk menyediakan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister sangat terbatas</li> </ul> </li> </ul>

**FORM 5**  
**PENJAMINAN KUALITAS PROSES PELAKSANAAN PEMBUATAN**  
**DOKUMEN KLHS RPJMD**

**Keterangan: (V) = sudah tersedia/dilaksanakan, (X) = belum tersedia/dilaksanakan**

1. Penilaian: Desain Proses Pembuatan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
1. KLHS RPJMD dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan RPJMD.	V	Jadwal Pembuatan KLHS
2. Terdapat mekanisme komunikasi antara tim pembuat KLHS RPJMD dengan tim perencana.	V	Berita Acara kesepakatan antara Tim Pembuatan KLHS dan Tim Perencana RPJMD
3. Rekomendasi yang diusulkan dalam KLHS RPJMD telah didiskusikan dengan tim perencana dalam penyusunan RPJMD.	V	Berita Acara kesepakatan integrasi rekomendasi KLHS RPJMD ke dalam penyusunan RPJMD.
4. KLHS RPJMD telah disusun oleh tim pembuat yang ditetapkan dengan SK.	V	SK Tim Pembuatan KLHS

2. Penilaian: Laporan KLHS RPJMD		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Laporan KLHS telah memuat:		
1. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah pengkajian kondisi umum daerah.	V	Tertuang dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah pengkajian dan hasil pengkajian capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan.	V	Tertuang dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah pengkajian dan hasil pengkajian pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya.	V	Tertuang dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
4. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah pengkajian dan hasil pengkajian perumusan alternatif skenario pembangunan berkelanjutan.	V	Tertuang dalam perumusan skenario laporan induk KLHS RPJMD
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam RPJMD.	V	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD



<b>2. Penilaian: Laporan KLHS RPJMD</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
6. Hasil penjaminan kualitas KLHS.	V	Form penjaminan kualitas yang sudah ditandatangani kepala daerah
7. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi- KLHS untuk pengambilan keputusan secara jelas.	V	Ringkasan eksekutif KLHS RPJMD
8. Tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.	V	Laporan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD

<b>3. Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
1. Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah disepakati oleh pemangku kepentingan dan akar masalah telah disampaikan dengan jelas.	V	Berita Acara Uji Publik
2. Hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan:		Tertuang dalam laporan induk KLHS RPJMD
a. Karakteristik wilayah	V	
b. Tingkat pentingnya potensi dampak	V	
c. Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup	V	
3. Hasil rumusan prioritas isu strategis sudah memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:		Tertuang dalam laporan induk KLHS RPJMD
a. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	V	
b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.	V	
c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.	V	
d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	V	
e. Status mutu dan ketersediaan SDA.	V	
f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	V	
g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	V	
h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	V	
i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	V	
j. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	V	

<b>4. Penilaian: Analisis DDDT dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
1. Tersedia informasi yang menjelaskan capaian dan proyeksi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan.	V	Tertuang dalam kondisi pencapaian TPB Laporan Induk KLHS RPJMD
2. Tersedia informasi yang menjelaskan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan terkini dan/atau kecenderungannya.	V	Tertuang dalam kondisi umum daerah Laporan Induk KLHS RPJMD
3. Telah dilakukan analisis pengaruh kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan terhadap	V	Tertuang dalam kondisi umum daerah Laporan Induk KLHS RPJMD



<b>4. Penilaian: Analisis DDDT dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
pencapaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.		
4. Telah dilakukan analisis keterkaitan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan terhadap sasaran strategis pembangunan yang ditentukan.	V	Tertuang dalam kondisi pencapaian TPB Laporan Induk KLHS RPJMD

<b>5. Penilaian: Pengkajian</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
Muatan pengkajian KLHS RPJMD mencakup substansi :		
1. Kondisi umum daerah berupa Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan, kondisi geografis, demografis, dan keuangan daerah.	V	Tertuang dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
2. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan.	V	Tertuang dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
3. Pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya.	V	Tertuang dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
4. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan.	V	Tertuang dalam perumusan skenario laporan induk KLHS RPJMD
5. Rumusan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah.	V	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD

<b>6. Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
Bentuk rekomendasi alternatif skenario pembangunan berkelanjutan mencakup:		
1. Isu strategis yang dirumuskan dengan pertimbangan kondisi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan, serta target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	V	Tertuang dalam perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah Laporan Induk KLHS RPJMD
2. Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	V	Tertuang dalam perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah Laporan Induk KLHS RPJMD
3. Sasaran strategis berupa kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan.	V	Tertuang dalam perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah Laporan Induk KLHS RPJMD
Dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif skenario pembangunan berkelanjutan.	V	Tertuang dalam metodologi Laporan Induk KLHS RPJMD
Langkah-langkah mitigasi mencantumkan perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak risiko yang mungkin/masih akan muncul.	-	-
Rekomendasi KLHS terkait hasil kajian Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan diidentifikasi dengan jelas.	V	Tertuang dalam laporan induk KLHS RPJMD



6. Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari pengkajian pembangunan berkelanjutan dan penyusunan alternatif skenario.	V	Tertuang dalam Skenario Pembangunan Berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD
Disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk kebijakan, rencana, dan program.	V	Tertuang dalam Skenario Pembangunan Berkelanjutan laporan induk KLHS RPJMD

7. Penilaian : Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah telah terpenuhi:		
1. Dokumen SK pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD	V	Tertuang dalam Laporan Proses Pembuatan KLHS
2. Laporan induk KLHS RPJMD	V	Laporan tersendiri
3. Ringkasan eksekutif KLHS RPJMD	V	Laporan tersendiri
4. Laporan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD	V	Tertuang dalam Laporan Proses Pembuatan KLHS
5. Data pendukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	V	Tertuang dalam Laporan Proses Pembuatan KLHS
6. Dokumen penjaminan kualitas	V	Laporan tersendiri

8. Penilaian : Partisipasi pemangku kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
1. Telah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik.	V	Tertuang dalam Laporan Proses Pembuatan KLHS
2. Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas.	V	Tertuang dalam Laporan Proses Pembuatan KLHS
3. Semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS.	V	Tertuang dalam Laporan Proses Pembuatan KLHS
4. Semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS.	V	Dapat diakses di <a href="https://baperlitbang.klungkungkab.go.id/">https://baperlitbang.klungkungkab.go.id/</a>

Bupati Klungkung

I Nyoman Suwirta



**Penilaian:**

$$\text{Indeks Nilai} = \frac{\text{Total yang sudah tersedia/dilaksanakan (V)}}{\text{Total kriteria}}$$

Dengan kategori penilaian sebagai berikut:

A	B	C	D	E
0,8 – 1	0,6 – 0,79	0,4 – 0,59	0,2 – 0,39	0 – 0,19

$$\text{Indeks Nilai} = \frac{45}{53} = \mathbf{0,849} \text{ (nilai A)}$$